



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD IDRIS
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I
3. NHK : 153279

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 660 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SCORPIO 5 BP Z Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5G/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 63.975.718

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.511.075.718

III. HUTANG Rp. 214.760.158

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.296.315.560

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.